ANALISIS PENERAPAN TEORI AGENDA SETTING PADA SURAT KABAR HARIAN SERAMBI INDONESIA DAN HARIAN WASPADA

Darmadi[1]

Abstract: Penelitian ini berjudul: **Analisis Penerapan Teori Agenda Setting pada Surat Kabar Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada** dengan tujuan *pertama,* Untuk mengetahui Bagaimana Analisis penerapan Teori Agenda Setting pada Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada. *Kedua*, Mengetahui Bagaimana Contoh-contoh berita yang berkaitan dengan Penerapan Teori Agenda Setting di Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dimana penulis menganalisa bagaimana Penerapan Teori Agenda Setting padaHarian Serambi Indonesia dan Harian Waspada serta contoh contoh beritanya. Data diperoleh dengan studi dokumentasi pada koran Serambi Indonesia dan Harian Waspada yang ikut berperan dalam pemberitaan mengenai beberapa persoalan yang sering diberitakan oleh kedua media tersebut antara lain wacana duduk ngangkang di kota Lhokseumawe, polemik bendera Aceh, pembentukan Provinsi ABAS-ALA, dan Demo guru menuntut dana sertifikasi. Hasil dari penelitian ini terungkap bahwa terori agenda Setting dilaksanakan dalam penerbitan Surat Kabar Harian Serambi Indonesia dan koran Waspada. Bentuk dari Aplikasi teori ini adalah adanya koordinasi bahkan petunjuk yang diberikan oleh Manajemen Redaksi Koran Harian Serambi Indonesia dan Koran Harian Waspada kepada para Koordinator Liputan dan para wartawan untuk menelusuri dan menulis perkembangan tentang Informasi-informasi terbaru yang layak muat dan sedang hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan. Dalam melaksanakan perannya Menyampaikan informasi kepada pembaca, ditemukan adanya berita-berita yang berhubungan dengan aplikasi Teori Agenda Setting pada koran Harian Serambi Indonesia dan Koran Waspada.

Kata Kunci: *Teori Agenda Setting, Surat Kabar, Serambi Indonesia*

[1] Penulis merupakan dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Lhokseumawe

Pendahuluan

Media massa adalah media yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan kebutuhan informasi yang melibatkan penerimaan pesan tersebut dimana tanpa diketahui kebenaranya. " media massa adalah alat yang digunakan dalam penciptaan pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat komunikasi mekanis seperti surat kabar. Dapat kita lihat bagaimana fungsi dan peran surat kabar sebagai media komunikasi untuk khalayak pembaca dimana dapat dikatakan sebagai jendela pengetahuan untuk meluaskan pandangan kita dan memungkinkan kita dapat informasi yang terjadi disekitar kita, juru baca dan menjelaskan makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas, pembawa atau pengantar informasi serta sebagai pengontrol sosial.

Dari berbagai media massa yang ada, surat kabar banyak dipilih oleh masyarakat sebagai media komunikasi dan media informasi karena memiliki kelebihan dimana dalam suatu berita memiliki penjelasan yang mendalam tentang suatu berita tersebut, surat kabar yang memiliki karakter tersendiri dibanding dari media yang lain yaitu penyebaran informasi sebanyak-banyaknya yang dapat diterima khalayak pembaca, keteraturan penerbit yang setiap hari dapat dinikmati khalayak pembaca, isi yang memiliki beraneka ragam dengan didasari oleh aspek kehidupan manusia, informasi yang memiliki dasar fakta dan opini yang relevansi, informasi yang dapat dilihat lagi tanpa membeli atau mengakses kembali. Dari penjelasan diatas banyak fungsi dan kelebihan surat kabar sebagai komunikasi informasi untuk khalayak, maka surat kabar yang begitu penting sebagai konsumsi informasi semua pihak sebagai media untuk mengetahui berbagai perkembangan terbaru yang perlu diketahui oleh khalayak.

Dapat dikatakan peran penting surat kabar sebagai informasi pembaca selalu mengedepankan informasi yang mendidik dan relevan untuk pembacanya, dimana kebutuhan informasi setiap individu berbeda-beda, disinilah para pembaca seharusnya menyadari betapa penting peran surat kabar untuk mendapatkan perkembangan kejadian kehidupan sehari-hari dalam semua masyarakat. Surat kabar yang

berusaha untuk memberikan informasi yang bermutu dan relevan tidaklah untuk memberikan komunikasi kepada masyarakat dengan tulus, ini karena surat kabar memiliki tujuan agar masyarakat khusunya mahasiswa untuk mengkritisi perkembangan dalam aspek-aspek apapun karena surat kabar memberikan beranekaragam berita dalam setiap harinya. Dengan demikian surat kabar selalu senantiasa dengan cermat mengikuti perkembangan masyarakat khususnya mahasiswa dan lingkunganya. Dari berjuta kejadian dan permasalahan diharapkan surat kabar tetap harus dapat selektif yang tepat, sehingga kebutuhan pembaca dan masyarakat khalayak pembacanya akan informasi terpenuhi.

Kehadiran media massa tentu saja tidak terlepas dari berbagai Teori Komunikasi Massa. Salah satu diantaranya adalah Teori Agenda Setting yang dikenal luas dan sudah banyak dipergunakan oleh kalangan Media. Menurut Asumsi teori ini, media memiliki kekuatan untuk menentukan agenda-agenda berita yang akan ditulis dan diedarkan lewat media. Hal ini berlaku dalam semua katagori media baik cetak maupun elektronik.

Pada tatanan media cetak seperti surat kabar, Teori Agenda Setting juga kita temukan. Ini dapat kita lihat pada isu-isu tertentu yang dijadikan pilihan berita secara terus menerus oleh sebuah Surat Kabar. Pemilihan tema-tema berita tertentu tersebut tentu memiliki banyak alasan, mulai dari isu aktual dan faktual hingga kepada alasan penambahan oplah.

Sebagai contoh, dalam amatan penulis beberapa minggu terakhir beberapa berita yang menjadi pilihan utama pada Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada antara lain tentang Konflik Lambang dan Bendera Aceh, Pembentukan Provinsi ABAS, Persoalan Pro Kontra Seruan Larangan duduk ngangkang ala Walikota Lhokseumawe, Demo guru dan Kobar GB tentang TPK guru bersertifikasi, dan berita berita lain.

Tema-tema tersebut penulis amati menjadi pilihan dari *headline* koran Serambi Indonesia dan Juga Harian Waspada. Meski memiliki analisis yang berbeda-beda, namun penulis mengamati ada benang merah tersendiri dalam penentuan dan pemilihan agenda sehingga berita

tersebut dimuat. Perbedaan analisis tersebut wajar terjadi, mengingat arah pemberitaan kedua media tersebut tentu saja berbeda-beda. Sebab Serambi Indonesia merupakan Surat Kabar Harian yang terbit di Aceh, tentu memiliki analisis tersendiri tentang Aceh dan berita-berita yang diangkat menjadi Headline.

Begitu juga dengan Harian Waspada, meski Koran ini adalah Koran Nasional, namun pilihan berita-berita tentang Aceh juga menjadi menjadi perhatian tersendiri dari jajaran redaksinya. Hal ini tentu sangat beralasan mengingat Aceh adalah salah satu target peredaran dari koran yang terbit di Medan Sumatera Utara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti tentang Analisis Penerapan Teori Agenda Setting Pada Surat Kabar Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada.

Yang menjadi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan penerapan Teori Agenda Setting dalam media khususnya pada koran Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada. Kedua media tersebut akan dijadikan fokus untuk melihat bagaimana pelaksanaan Teori Agenda Setting itu diberlakukan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa contoh-contoh berita yang berkaitan dengan penerapan Teori Agenda Setting serta pengaruhnya bagi para pembaca.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis penerapan Teori Agenda Setting pada Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada, Bagaimana Contoh-contoh berita yang berkaitan dengan Penerapan Agenda Setting di Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada.

Kerangka Konseptual/Kerangka Teoritis

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konpseptual yang berhubungan dengan judul penelitian. Kerangka konseptual ini digunakan untuk memudahkan penulis mengkaji literatur-literatur yang berkenaan dengan tujuan penulisan. Kerangkan konseptual yang peneliti gunakan adalah ;

1. Media Cetak/Surat Kabar

Media tidak hanya sekedar penyebar informasi. Media memiliki sejumlah tanggung jawab ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial dan kadangkala menunjukkan arah atau memimpin, serta berperanserta dalam menciptakan hubungan dan integrasi. Dalam masyarakat, media bergerak dengan ditandai oleh adanya penyebaran kekuasaan, yang diberikan kepada individu, kelompok, dan kelas sosial secara tidak merata.

McQuail,[2] menyebutkan media seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal seperti : menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap, memberikan status dan legitimasi, mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas.

Salah satu media yang sering digunakan dalam membentuk persepsi realitas sebagaimana disebutkan di atas adalah surat kabar. Surat kabar telah lama dipergunakan untuk penyebaran informasi. Sejalan dengan berjalannya waktu, surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja, tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat kabar.

Suwardi[3] menjelaskan bahwa fungsi-fungsi dari surat kabar adalah sebagai berikut :

a. Fungsi menyiarkan informasi, berbagai informasi dengan cepat dan akurat dapat disampaikan oleh surat kabar. Pembaca menjadi pembeli ataupun berlangganan surat kabar karena ingin mengetahui informasi apa yang terjadi di berbagai tempat di dunia.
b. Fungsi mendidik, surat kabar secara tidak langsung memberikan fungsi pendidikan pada pembacanya. Ini bisa dilihat dari materi isi seperti artikel, *feature* dan juga tajuk. Materi isi tersebut disamping memberikan informasi juga menambah perbendaharaan pengetahuan

[2] Denis Mc Quail, *Mass Communication Theory*..(California : Sage Publication), 1987, hal.3.

[3] Herry Suwardi, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1993, hal. 56-60.

pembacanya walaupun bobot pemahaman tiap pembaca berbeda-beda.

c. Fungsi mempengaruhi, berita pada surat kabar secara tidak langsung mempengaruhi para pembacanya, sedangkan tajuk rencana dan artikel dapat memberikan pengaruh langsung kepada pembacanya. Pengaruh ini pada mulanya timbul dari persepsi pembaca terhadap suatu masalah yang kemudian membentuk opini pada pembacanya.

Menurut Suwardi[4] umumnya isi dari suatu surat kabar terdiri dari berita utama yang terletak di halaman depan, berita biasa, rubrik opini, reportase, wawancara, *feature,* iklan, cerita pendek, cerita bergambar, dan lain-lain. Semua komponen itu diramu sedemikian rupa agar pembaca tertarik membaca dan menjadi pelanggan surat kabar itu. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi akan berlangsung dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut : sumber, pesan, saluran, penerima dan efek.

Menurut McQuail[5], komunikasi merupakan suatu proses dimana seorang individu (komunikator) menyampaikan rangsangan biasanya dalam simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku individu lain (komunikan). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa saluran atau media merupakan salah satu unsur penting dalam proses komunikasi. Saluran komunikasi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu saluran personal dan saluran massa atau media massa yang kerap disebut dengan komunikasi massa.

Menurut Devito[6], komunikasi massa adalah komunikasi dengan radio, televisi, surat kabar, majalah, hasil rekaman radio kaset dan piringan hitam, dengan begitu, media massa dapat diklasifikasikan menjadi media massa cetak dan media massa elektronik. Surat kabar sebagai salah satu media massa cetak merupakan lembaga yang menyebarkan informasi atau berita sebagai karya jurnalistik kepada masyarakat. Peranan media massa memberitakan informasi yang diperlukan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

[4] *Ibid.,*

[5] Denis Mc Quail, *Ibid.,* hal. 24.

[6] Joseph Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, Edisi 5 (alih bahasa Maulana A). (New York : Harper Collin Publisher, 1996), hal. 101.

1999 Tentang Pers, dalam pasal 6 point (a) Undang-Undang tersebut dinyatakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang diperlukan dan dalam hal ini lembaga pers berkewajiban memenuhinya.

Menurut Effendi[7], surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-cirinya, yaitu: publisitas (isi surat kabar tersebut disebarluaskan kepada publik), periodisitas (surat kabar terbit secara teratur setiap hari, seminggu sekali atau dua mingguan), universalitas (isi surat kabar tersebut bersifat umum yang menyangkut segala aspek kehidupan) dan aktualitas (yang dimuat surat kabar mengenai permasalahan aktual).

Fungsi media massa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi: "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial". Sementara peranan pers nasional sebagai media untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, benar dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran dinyatakan dalam pasal 6 (point c,d,e) Undang-Undang tersebut.

Penggambaran fungsi media massa secara lebih jelas dikemukakan Schramm dalam Jahi[8], ia mengemukakan 3 (tiga) fungsi media massa dalam pembangunan, yaitu :

a. Memberi tahu tentang pembangunan nasional, memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan untuk berubah, kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metoda dan cara menimbulkan perubahan dan jika mungkin meningkatkan aspirasi.
b. Membantu rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog dan menjaga agar informasi mengalir baik keatas maupun kebawah.
c. Mendidik rakyat agar memiliki keterampilan.

[7] Onong Uchjana Effendi, *Dinamika Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal.54.

[8] Amri Jahi, *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga*. (Jakarta : Gramedia, 1993), hal. 63.

Selanjutnya, sebagai agen perubahan sosial, menurut Rachmadi[9], surat kabar memiliki beberapa tugas yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan, yaitu:

a. Memperluas cakrawala pandangan. Dalam hal ini melalui surat kabar orang mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di negaranegara lain.
b. Memusatkan perhatian masyarakat dengan pesan-pesan yang ditulisnya.
c. Menumbuhkan aspirasi. Dengan penguasaan media, suatu masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru apa yang disampaikan oleh media tersebut.
d. Menciptakan suasana membangun, Melalui surat kabar dan media massa lainnya dapat disebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Surat kabar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan membangun simpati, memusatkan tujuan pembangunan sehingga tercipta suasana pembangunan yang serasi dan efektif. Sesuai perannya, surat kabar dapat digunakan untuk menyampaikan informasi lingkungan. Penyebaran informasi lingkungan sangat diperlukan mengingat berbagai kegiatan pembangunan memiliki kaitan erat dengan isu lingkungan dan isu lingkungan memiliki kaitan erat dengan kualitas hidup manusia. Surat kabar bersama media massa lainnya terbukti berperan membangun kesadaran publik akan pentingnya upaya mengelola lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berarti bagaimana penerapan Teori Agenda Setting dalam media massa terutama harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada. Tujuan utama dari penelitian yang deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis tercapai. Secara populer dapat dikatakan bahwa klasifikasi bertujuan untuk mencapai penertiban yang analitis dalam gejala-gejala sosial yang kompleks. [10] Deskripsi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi penggambaran tentang konsep

[9] Rachmadi, F., *Perbandingan Sistem Pers.* (Jakarta : Gramedia, 1989), hal. 25.
[10] J.Vredenbregt, Metode dan tehnik penelitian masyarakat, 1980 : 34

teori Agenda Setting, Contoh berita yang mengandung unsur teori Agenda Setting serta pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan teori Agenda Setting kepada para pembaca. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Konsep dan aplikasi Teori Agenda Setting pada harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada. Secara rinci, subjek penelitian ini adalah berita-berita utama yang menjadi headline pada kedua media tersebut. Berita-berita tersebut dipilih karena dianggap bagian dari Penerapan Teori Agenda Setting yang dijalankan oleh Media Massa untuk kemudian dikaji bagaimana pengaruhnya terhadap para pembaca kedua Surat Kabar tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penerapan Teori Agenda Setting pada Surat Kabar Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada.

Dalam melaksanakan fugas dan fungsi menyampaikan informasi kepada pembaca, maka Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada tentu harus mempersiapkan diri dalam menyiapkan berita yang akan disampaikan. Dikoran Serambi Indonesia, setiap ada isu-isu baru yang berkembang dalam masyarakat, maka Manajemen Redaksi akan memantau perkembangan berita tersebut melalui para wartawan atau koresponden yang ada di daerah. Mereka diarahkan untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang perkembangan isu-isu penting dan baru serta layak untuk diberitakan.[11]

Begitu juga dengan Koran Waspada, setiap ada kejadian-kejadian baru yang layak untuk diberitakan, manajemen Redaksi di Medan akan memantau dan mengarahkan Koordinator Peliputan Daerah untuk menelusuri dan mendalami informasi dimaksud. Setelah itu setiap pagi Koordinator Peliputan akan mengarahkan para wartawannya untuk mencari data-data dan informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang

[11] Wawancara dengan Jafaruddin, Wartawan Serambi Indonesia di Kota Lhokseumawe tanggal 16 September 2013

perlu diberitakan.[12] Untuk mendapatkan Informasi yang berkenaan dengan penerapan Teori Agenda Setting, setelah melaksanakan wawancara dengan wartawan Serambi Jafaruddin dan Wartawan Waspada Maimun Asnawi sesuai dengan tujuan penelitian ini ditemukan ada beberapa pertimbangan tentang nilai berita yang dilaksanakan oleh wartawan Harian Serambi Indonesia dan Waspada yang bertugas di Kota Lhokseumawe. Pertimbangan tersebut antara lain:

1. Faktor kedekatan dengan Narasumber.
   Pemilihan narasumber yang akan menjadi objek sebuah berita didasari oleh pertimbangan tentang narasumber dan lokasi kejadian sebuah peristiwa terjadi. Dalam konteks ini, berita wabah penyakit yang menyerang warga Kota Lhokseumawe dan sekitarnya akan lebih menarik untuk diliput dan ditulis karena ia berkenaan dengan persoalan yang dihadapi oleh orang banyak. Dengan adanya informasi yang ditulis oleh media, masyarakat akan dapat mengetahui berbagai informasi yang terutama yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kesehatan. Selain itu berita Demo guru yang menuntut pembayarakan uang Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) di Kota Lhokseumawe juga menjadi salah satu tema yang menjadi perhatian dari Koordinator Peliputan Serambi Indonesia dan Waspada di Kota Lhokseumawe. Selain pertimbangan bahwa berita tersebut juga menyangkut kepentingan banyak orang, pemilihan berita tersebut juga akan meningkatkan oplah dari koran Serambi dan Waspada. Hal ini disebabkan karena biasanya masyarakat akan cepat-cepat membeli koran ketika mengetahui ada berita yang berkaitan dengan dirinya yang ditulis oleh sebuah media.
2. Faktor Sensasional dan fenomenal
   Salah satu nilai berita yang menjadi pertimbangan adalah karena mengandung unsur fenomenal yang biasanya ingin diketahui oleh pembaca. Berita "Ngangkang Style"ala Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah salah satu contohnya. Di harian Waspada

[12] Wawancara dengan Maimun Asnawi, Wartawan Waspada di Kota Lhokseumawe tanggal 2 September 2013

berita tentang isu ini sempat bertahan beberapa minggu meski harus dikupas dengan isu yang berbeda-beda agar tidak membosankan pembaca. Karena itu ketika isu tentang "Ngangkang Style" itu mencuat, Koordinator liputan Serambi Indonesia dan Waspada di Kota Lhokseumawe menjadikan tema ini sebagai salah satu target pemberitaan untuk Kota Lhokseumawe. Sebelum berpencar di pagi hari, koordinator peliputan Waspada di Kota Lhokseumawe sering mengarahkan para wartawan untuk menjadi tema "Ngangkang Style" ini sebagai sasaran berita dengan mewawancarai narasumber dari berbagai kalangan agar tidak terkesan monotan. Dalam situasi saat ada isu-isu fenomenal seperti itu kreatifitas dan naluri seorang wartawan sangat dibutuhkan untuk melihat nilai-nilai berita untuk diberitakan dari berbagai perspektif.

3. Isu-Isu Aceh dalam Skala Nasional

Meski menjadi Wartawan di Kota Lhokseumawe, namun perkembangan informasi tentang Aceh dalam konteks Nasional juga menjadi pilihan berita-berita yang akan ditulis dan dimuat di Harian Serambi Indoensia dan Waspada. Sebagai contoh adalah berita-berita tentang Konflik Bendera Aceh dan Pemerintah Pusat yang sempat menjadi perhatian media-media Nasional termasuk Waspada. Ketika masalah bendera ini sedang "memanas" bahkan hingga saat ini, manajemen Redaksi Waspada sering mengarahkan para Wartawan di Aceh terutama di Kota Lhokseumawe untuk memperdalam peliputan-peliputan yang berkaitan dengan konflik bendera Aceh itu. Misalnya dengan meminta komentar tokoh-tokoh yang ada di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara mengenai polemik bendera Aceh itu. Selain itu, juga diarahkan untuk memantau dan menulis perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seperti pengibaran bendera Aceh itu dimana-mana bahkan melaksanakan Upacara layaknya mengibarkan bendera Mera putih. Ada juga upaya penurunan bendera Aceh oleh aparat TNI menjelang perayaan HUT RI, bahkan Demo KPA dan Simpatisan Partai Aceh ke Polres menuntut pengembalian

bendera Aceh yang diambil bahkan dirusak. Kejadian-kejadian seperti ini, banyak ditemukan di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara sehingga Harian Serambi Indonesia dan Waspada menjadikan kejadian ini sebagai kejadian yang layak untuk diliput dan dimuat sebagai berita. Contoh lain adalah Berita tentang Pembentukan Provinsi ABAS-ALA. Meski isu ini adalah isu pantai barat selatan, namun bukan berarti Wartawan yang ada di Lhokseumawe tidak bisa menulis berita itu, asalkan mendapatkan narasumber yang kompeten tentang itu. Seperti, ketika Kunjungan Kerja Menteri ke Lhokseumawe, Pimpinan atau Anggota DPR/MPR RI dan lain-lain.

2. **Contoh Berita yang berkenaan dengan Pelaksanaan Teori Agenda Setting**

a. **Yang berkaitan dengan "Ngangkang Style"**

LARANGAN DUDUK NGANGKANG TERUS BERLANJUT

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe memastikan larangan duduk ngangkang bagi wanita saat berboncengan sepeda motor dengan laki-laki, belum memerlukan aturan khusus seperti peraturan daerah (qanun) maupun peraturan wali kota (perwal). Namun, larangan itu masih berupa imbauan yang diperkuat melalui ceramah-ceramah di masjid dan meunasah.

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Selasa (27/8), menegaskan kebijakan larangan duduk ngangkang di wilayah itu masih berlanjut, namun dalam bentuk imbauan. "Didasari memang, duduk ngangkang bukan budaya kita masyarakat Aceh. Makanya tidak perlu adanya peraturan khusus, tapi cukup dengan imbauan dan seruan," pungkasnya.

Suaidi mengakui, selama ini, masyarakat yang mengikuti imbauan tersebut sangat minim. Hal ini akibat tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. "Karena itu, warga akan terus diingatkan, melalui razia-razia yang

dilakukan petugas WH, serta melalui ceramah di masjid dan meunasah," ungkap Suadi.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya, pada akhir tahun 2012 lalu, mengeluarkan pernyataan yang melarang kaum perempuan di Lhokseumawe duduk ngangkang di atas sepeda motor. Pernyataan tersebut diperkuat dengan mengeluarkan imbauan resmi pada 7 Januari 2013 lalu. Imbauan itu kemudian diikuti dengan merazia pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi imbauan tersebut.**(bah)**[13]

b. Yang berkaitan dengan Konflik Aceh-Jakarta tentang Bendera Aceh

BENDERA ACEH KAGETKAN JAKARTA
Materi Qanun WN Ada yang tak Sesuai Perundang-undangan

JAKARTA - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan mengaku kaget saat mendengar bahwa bendera dan lambang daerah Aceh yang disahkan persis seperti bendera dan lambang GAM.
"Seingat saya, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, kita sudah sampaikan ada 10 potensi pelanggaran undang-undang apabila menggunakan lambang dan bendera yang disodorkan ketika itu," kata Djohermansyah menjawab Serambi di Jakarta, Selasa (26/3).

Djohermansyah juga mengatakan, inisiator perdamaian Aceh Jusuf Kalla dan bekas Ketua Juru Runding Pemerintah Indonesia Hamid Awaluddin yang hadir dalam pertemuan waktu itu juga sudah mengutarakan pandangannya, bahwa perlu ada modifikasi lambang dan bendera sehingga tidak persis sama dengan lambang dan bendera GAM.

"Dalam pandangan kami, pertemuan itu telah memberi sebuah

[13] Serambi Indonesia 28 Agustus 2013

kesepakatan untuk melakukan modifikasi. Kalau kemudian ternyata modifikasi tidak dilakukan, saya tidak mengerti," kata Prof Djohermansyah.

Menurut Djohermansyah, Kemendagri akan memberikan klarifikasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang baru disahkan DPRA. "Ada dua hal yang akan dilihat dari qanun tersebut. Pertama apakah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya dan kedua apakah bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak," kata Djohermansyah Djohan.

Kemendagri, lanjutnya, telah mengirimkan radiogram kepada Gubernur Aceh untuk segera mengirimkan naskah Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang Bendera dan Lambang Aceh. Djohermansyah Djohan dijadwalkan terbang ke Banda Aceh pada 1 April 2013 untuk bertemu Pemerintah Aceh. "Dalam pertemuan itu akan kita sampaikan klarifikasi Mendagri," katanya.

Dirjen Otda mengatakan Kemendagri akan meneliti dan mempelajari secara serius qanun tersebut. "Setelah kita teliti, baru kita sampaikan klarifikasinya seperti apa," ujar Djohermansyah. Dirjen Otda menambahkan, Kemendagri sudah menyelesaikan klarifikasi Qanun Lembaga Wali Nanggroe (WN). "Ada beberapa materi dalam Qanun Wali Nanggroe yang tidak sesuai dengan perundang-undangan," sebut Djohermansyah. Namun ia menolak merinci butir-butir mana saja dari isi Qanun Wali Nanggroe yang bertentangan dengan undang-undang.

"Nanti pada pertemuan dengan gubernur dan Ketua DPRA, akan saya sampaikan surat Menteri Dalam Negeri yang berisi klarifikasi terhadap Qanun Wali Nanggroe," demikian Djohermansyah. Perkembangan di Aceh sejak tiga hari terakhir, pengibaran bendera Aceh terlihat makin semarak di bebeerapa daerah. Selain pengibaran bendera Aceh di bangunan-bangunan milik masyarakat, juga konvoi kendaraan mengarak bendera berwarna merah dengan lambang bintang bulan itu semakin ramai. Pada Selasa kemarin, seratusan warga menggunakan sepeda motor dan mobil, konvoi mengelilingi Kota Lhokseumawe bahkan ke sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan hingga ke Kecamatan

Tanah Jambo Aye dan Muara Batu, Aceh Utara.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Lhokseumawe, M Jaini Jafar kepada Serambi menyebutkan, hingga Selasa kemarin pihaknya belum menerima perintah untuk menaikkan dan melakukan konvoi bendera Aceh. "Kalau pun ada yang menaikkan atau melakukan konvoi, itu murni inisiatif masyarakat sebagai refleksi kegembiraan," kata M Jaini alias Pangben.
Wartawan Serambi di berbagai daerah melaporkan, bendera Aceh terlihat semakin banyak berkibar di sejumlah kawasan Aceh, antara lain Abdya, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Tamiang, dan Pidie Jaya. Bahkan, di Kota Lhokseumawe, untuk pertama sekali pelantikan Pengurus DPW-PA Kota Lhokseumawe dikibarkan bendera berlambang bintang bulan tersebut dipasang di sebelah kanan Podium Aula Pertemuan Gedung Hasbi Assidqi Mon Geudong, Bandasakti, Kota Lhokseumawe, Selasa (26/3).**(fik/c37/ib/c46/nun/az/c42/na/c43)**[14]

Presiden RI SBY Undang Zaini Bahas Bendera

Sabtu, 6 April 2013 15:57 WIB

*** Lambang Daerah bukan Ranah Politik**
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, masalah bendera dan lambang daerah bukanlah ranah politik, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui proses yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Untuk membicarakan hal itu dalam konteks keacehan, SBY akan mengundang Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah dalam waktu dekat.

"Saya akan mengundang Gubernur Zaini Abdullah untuk membicarakan persoalan lambang daerah Aceh tersebut. Harapan saya, pembicaraan itu berakhir dengan baik kembali sesuai dengan ketentuan UUD, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Kemudian, segala sesuatunya bisa

[14] Koran Serambi Indonesia , 27 Maret 2013

kita selesaikan dengan baik," kata Presiden SBY seusai shalat Jumat di Kompleks Istana Presiden Jakarta, kemarin.

Ia pertegas bahwa lambang daerah itu bukanlah wilayah politik, melainkan wilayah ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan hukum yang berlaku. "Oleh karena itu, saya sudah tugasi Menko Polhukam dan Mendagri melakukan pembicaraan yang baik dan konstruktif. Mendagri sudah berkunjung ke Aceh, sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur, DPR Aceh, dan semua pihak yang kita anggap patut untuk kita ajak bicara," kata Kepala Negara sembari berharap hasil pembicaraan Mendagri dengan multipihak di Aceh dapat membawa pemahaman yang positif.

"Harapan saya, pembicaraan itu berakhir dengan baik, kemudian segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik. Saya tidak ingin kita mundur dan saya tak ingin ada masalah-masalah baru yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena kita harus bersatu menyelesaikan pembangunan di Aceh menuju ke kehidupan masyarakat Aceh yang aman, tenteram, damai, dan lebih spesifik lagi sejahtera," imbuh Kepala Negara.

Presiden juga mengingatkan apa yang sudah dilakukan negara kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), begitu MoU Helsinki ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. "Saya sudah keluarkan amnesti kepada seluruh anggota GAM dan kemudian tentunya pikiran-pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai kelanjutan dari gerakan pemisahan diri itu juga harus dihentikan." Dalam konteks pemikiran seperti itulah, kata Presiden SBY, semua pihak harus meletakkan isu tentang lambang dan bendera Aceh dimaksud. "Saya masih berharap, dalam satu dua minggu hal itu selesai dan kemudian tidak ada lagi gangguan apa pun atas masalah-masalah itu. Yang jelas, Merah Putih harus berkibar di seluruh Tanah Air. Itu bendera kita dan daerah bisa saja memiliki lambang, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan undang-undang, semangat, serta jiwa bahwa hanya ada satu bendera kedaulatan kita, yaitu sang Merah Putih."

Taati aturan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh itu menyangkut persoalan penegakan hukum daerah yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. "Ada mekanisme dan sistem yang harus ditaati oleh semua provinsi. Saya hanya meminta peraturan dan hukum yang berlaku ditaati," kata Gamawan di kantornya seusai bertemu Presiden SBY, kemarin.

Kamis (4/4) lalu, Mendagri melakukan pertemuan tertutup di Banda Aceh dengan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf.

Mendagri mengatakan, pertemuan yang berlangsung selama lima jam itu membahas mengenai pendapat masing-masing pihak mengenai ketentuan penggunaan lambang dan bendera Aceh.

Pemerintah juga memberi waktu 15 hari terhitung sejak 1 April kepada Pemerintah Aceh untuk mengkaji kembali penggunaan simbol bintang dan bulan sabit yang identik dengan bendera GAM pada bendera Aceh.

"Kesimpulannya, hal ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyampaian ke DPRA oleh Gubernur Aceh. Kemudian DPRA akan menyidangkan kembali untuk dibahas," ujarnya.

Dinilai tepat

Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menilai sangat tepat Presiden SBY mengundang Gubernur Aceh untuk membicarakan Qanun tentang Lambang dan Bendera Aceh. Pertemuan tersebut bisa juga dimanfaatkan untuk membincangkan masalah belum rampungnya sejumlah RPP dan Perpres turunan UUPA.

"Melalui pertemuan seperti itu akan muncul dialog. Saya menilai itu positif dan kita harapkan lahir solusi," kata Farhan Hamid menjawab Serambi di Jakarta, Jumat (5/4). Farhan yang juga anggota DPD dari Aceh, mengatakan, persoalan Aceh harus diutamakan dalam kerangka pelestarian perdamaian. "Akan ada titik temu, karena konsen kita adalah menjaga dan merawat perdamaian yang sudah dicapai," ujarnya. **(tribunnews.com/fik)**[15]

Bintang Bulan dalam NKRI

Jumat, 12 April 2013 11:06 WIB
*** Aceh Harus Tetap Satu**

BANDA ACEH - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muzakir Manaf menyatakan, bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh dan Burak-Singa sebagai lambang Aceh, tidaklah bersifat negatif. Penggunaan kedua simbol daerah itu tidak pula menyiratkan adanya keinginan untuk ke luar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini hanya untuk kepuasaan batin orang Aceh saja, karena telah memiliki bendera dan lambang daerah. Jadi, tidak untuk tindakan yang diragukanlah. Malah masyarakat kita imbau, kalau mengibarkan bendera, maka kibarkan bersama bendera Merah Putih," ujarnya menjawab Serambi seusai ceramah agama untuk para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di rumah dinas Wagub Aceh, kawasan Blangpadang, Banda Aceh, Kamis (11/4) malam. Bulan lalu, acara serupa berlangsung di masjid dalam kompleks Meuligoe atau Pendapa Gubernur Aceh.

Di mata Muzakir Manaf, bendera Bintang Bulan maupun lambang Burak-Singa, itu sudah sah sebagai bendera dan lambang Aceh. "Soalnya, baik bendera maupun lambang Aceh sudah melalui Sidang Paripurna DPRA,

[15] Koran Serambi Indonesia , 6 April 2013

juga sudah ditandatangani oleh Gubernur Aceh, serta sudah disempurnakan, sehingga sudah sah," simpulnya.

Ditanya apakah ia akan memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jakarta untuk pembahasan lanjutan mengenai bendera dan lambang Aceh besok, 13 April, Muzakir mengatakan tidak akan hadir. "Saya tidak bisa hadir, karena sudah ada gubernur," ucapnya.

Ditanya tentang mencuatnya kembali aspirasi pembentukan Provinsi ALA dan Abas, Muzakir mengatakan, wacana mengenai itu harus mengacu kepada undang-undang serta rekomendasi dari DPRA dan Gubernur Aceh. "Kalau ada rekomendasi dan persetujuan maka sah-sah saja. Kalau tidak ada rekomendasi, maka tidak bisa dan Aceh harus tetap satu," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah Saleh mengatakan, 12 poin evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, tidak membuat Pemerintah Aceh puas. Maka untuk menindaklanjuti evaluasi qanun tersebut, digelar pertemuan lanjutan di Jakarta, Sabtu (13/4). Evaluasi lanjutan itu dilakukan setelah Mendagri Gamawan Fauzi dan jajarannya menggelar audiensi dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah selama dua sesi. Termasuk dengan sejumlah elemen di Banda Aceh. Pihak yang hadir adalah pemangku kepentingan yang ikut pertemuan sebelumnya, yaitu adalah Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, dan Wali Nangroe Malik Mahmud Al Haytar. Adapun, pihak pemerintah pusat diwakili Mendagri Gamawan Fauzi dan jajarannya. "Pertemuan ini diadakan agar didiskusikan lagi soal qanun secara lebih mendalam," kata Abdullah, Kamis (11/3). Menurut Abdullah Saleh, terhadap beberapa evaluasi Kemendagri, Pemerintah Aceh dan DPRA bakal membicarakan lebih lanjut agar tidak ada lagi persilangan pendapat dengan pusat. **(swa/rep)**[16]

[16] Serambi Indonesia, 12 April 2013

c. **Yang berkaitan dengan ABAS ALA**

Provinsi ABAS Dideklarasikan

***Diwarnai Konvoi Merah Putih di Meulaboh**

MEULABOH - Tokoh-tokoh barat-selatan Aceh, Sabtu kemarin berkumpul di Meulaboh mendeklarasikan lahirnya Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Pendeklarasian ABAS diwarnai konvoi bendera Merah Putih melibatkan ratusan becak bermotor di Meulaboh. Pendeklarasian Provinsi ABAS berlangsung di Meuligoe Hotel Meulaboh, Sabtu siang, 20 April 2013 oleh Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3-ABAS). Koordinator KP3-ABAS Aceh Selatan, Teuku Sukandi didampingi Ketua KP3-ABAS Tjut Agam bersama Adnan NS dalam konferensi pers menyatakan, pembentukan Provinsi ABAS dinilai sudah sah. "Meski secara de jure belum, namun secara de facto Provinsi ABAS hari ini telah lahir dan telah memisahkan diri dari Provinsi Aceh," kata Teuku Sukandi yang juga Ketua Harian Pront PETA Aceh.

Sukandi yang juga mantan anggota DPRK Aceh Selatan periode 1999-2004 menyatakan, ada alasan kuat untuk memisahkan diri dari Provinsi Aceh selaku provinsi induk, antara lain karena masih ada kesenjangan pembangunan dan ketidak-adilan antara wilayah timur-utara dan barat-selatan.

Selain belum adanya keadilan pembangunan antar-wilayah, porsi penempatan pejabat di jajaran Pemerintah Aceh selama dua periode pergantian gubernur dan wakil gubernur, menurut Sukandi belum juga mengakomodir putra daerah dari barat-selatan Aceh. "Kesenjangan yang diciptakan oleh Pemerintah Aceh telah menyebabkan berbagai persoalan sosial di kalangan masyarakat Aceh, sehingga memisahkan diri dari Provinsi Aceh menjadi solusi terbaik dan telah bulat untuk dilakukan," tandas Teuku Sukandi yang kini menetap di Tapaktuan, Aceh Selatan.

Ditanya wartawan bagaimana sikap KP3-ABAS jika rencana pembentukan provinsi baru ini tidak disetujui oleh gubernur, menurut Teuku Sukandi tak masalah karena untuk pembentukan provinsi baru tak perlu mendapatkan persetujuan gubernur. "Kalau pun pemerintah provinsi tak setuju, masih ada pemerintahan tertinggi di negara ini yakni pemerintah pusat yang dipimpin presiden," kata Sukandi. Teuku Sukandi juga mengingatkan janji Presiden SBY untuk melakukan pemekaran di Aceh dengan menyetujui pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan, sebagaimana diucapkan pada tahun 2009. "Kini kami menagih janji Presiden SBY," ujar Sukandi. Dia menegaskan, perjuangan untuk mewujudkan Provinsi ABAS dan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) tidak akan mundur lagi. "Tekad untuk memisahkan diri dari Provinsi Aceh sebagai provinsi induk sudah bulat dan harus dipenuhi oleh pemerintah pusat," demikian Teuku Sukandi dibenarkan Tjut Agam, purnawirawan TNI yang juga mantan Pimpinan DPRK Aceh Barat.

Pendeklarasian Provinsi ABAS di Meulaboh diwarnai konvoi becak bermotor sambil mengarak bendera Merah Putih. Konvoi Merah Putih yang melewati sejumlah ruas jalan utama di ibu kota Kabupaten Aceh Barat tersebut dikawal aparat kepolisian dan mendapat perhatian masyarakat.

Selain meneriakkan yel-yel Provinsi ABAS, peserta konvoi juga menggalang dukungan tanda tangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, dan Simeulu. Beberapa warga terlihat ikut mengecat badan mereka dengan cat merah dikombinasikan celana putih, sebagai bentuk penegasan bahwa Aceh tetap dalam NKRI.**(edi)**[17]

T Sukandi: Pembentukan ABAS tak Bertentangan dengan UUD

Selasa, 21 Mei 2013 15:30 WIB

[17] Serambi Indonesia, 21 April 2013

TAPAKTUAN - Pernyataan dua Ketua DPRK di wilayah barat-selatan (Aceh Barat dan Nagan Raya) yang menolak pemekaran Provinsi Aceh, mendapat tanggapan dari para pejuang pembentukan provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).

T Sukandi, mantan anggota DPRK Aceh Selatan yang diundang menjadi pemateri dalam acara pertemuan dan diskusi publik di Nagan Raya Sabtu (18/5) lalu, menyatakan, perjuangan pembentukan provinsi ABAS tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagai sumber dasar dari semua peraturan perudang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan T Sukandi kepada Serambi, Senin (20/5), menanggapi berita berjudul ''Dua Ketua DPRK Tolak Pemekaran Aceh,'' yang dirilis harian ini, Senin kemarin. ''Saya ingin meluruskan cara berpikir dua Ketua DPRK tersebut pada berita dimaksud. Untuk diketahui, kami memperjuangkan ABAS menjadi provinsi tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber dasar dari semua peraturan perundang-undangan berlaku di Republik ini,'' paparnya.

T Sukandi mengingatkan kepada dua ketua DPRK ini bahwa anggota dewan punya tanggung jawab mendengar, menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Karena itu, Sukandi mempertanyakan pernyataan Ketua DPRK Nagan Raya yang terkesan melecehkan aspirasi rakyat dan juga menjurus pada ancaman. ''Kalimat 'jika Pemerintah Pusat merespon pemekaran ini maka kami akan menempuh jalur politik' adalah bentuk pembakangan seorang warga negara yang bernama Juragan pada Pemerintah NKRI,'' papar T Sukandi. Sukandi juga mengatakan, Samsuardi alias Juragan harusnya menyadari bahwa ia menjadi anggota dan Ketua DPRK Nagan Raya karena Nagan Raya dimekarkan jadi Kabupaten Aceh Barat, sehingga terajadi percepatan pembangunan serta terjadinya peningkatan yang hasilnya dapat dirasakan seperti saat sekarang ini.

"Kami memperjuangkan ABAS jadi provinsi. Bukan untuk memperjuangkan ABAS jadi negara merdeka, namun untuk kemajuan dan kemakmuran wilayah pantai Barat-Selatan Aceh ke depan," pungkasnya**.(tz)**[18]

d. **Yang berkaitan dengan Demo Guru di Lhokseumawe**

Tuntut TPK, Guru Demo Lagi

Ratusan guru yang tergabung dalam KOBAR-GB Lhokseumawe kembali melakukan aksi di depan kantor Walikota terkait penghapusan TPK bagi guru sertifikasi. Kamis (14/4).
LHOKSEUMAWE - Ratusan guru Lhokseumawe, Kamis (11/4) sekitar pukul 15.00 WIB kembali demo ke Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Tuntutan mereka tetap sama dengan sebelumnya: jangan hapus tunjangan prestasi kerja (TPK) guru dan empat guru yang sudah dipindah ke Setdako Lhokseumawe supaya dikembalikan jadi guru.

Dalam unjuk rasa kali ini para guru menambahkan item tuntutan, yakni mendesak Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya agar mencopot Sekdako Dasni Yuzar, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Drs Rusli, dan Inspektur Lhokseumawe Drs Bustami. Ketiga pejabat itu dinilai pengunjuk rasa bertanggung jawab atas peniadaan TPK guru dan pengalihan guru menjadi pegawai kantoran. Amatan Serambi kemarin, ratusan guru mulai berkumpul di Gedung DPRK Lhokseumawe pukul 14.30 WIB. Kemudian mereka berjalan kaki mengusung poster dan spanduk bernada protes ke Kantor Wali Kota Lhokseumawe yang jaraknya hanya 150 meter dari titik kumpul.

Dari pukul 15.00 sampai 16.30 WIB secara bergantian orator aksi melancarkan protes terhadap kebijakan Pemko Lhokseumawe yang tahun ini menghapus TPK bagi para guru.

[18] Harian waspada 21 April 2013

Poster yang mereka bawa beraneka ragam redaksinya. Di antaranya, mengingatkan penguasa bahwa jabatan itu tidaklah kekal, tidak akan dibawa ke liang lahat. Poster lainnya menuding praktik kolusi dan nepotisme tumbuh subur di Bumi Pase. Dewan guru juga minta kepala dinas diganti.

Ada juga poster bernada ajakan, "Lawan pemimpin yang zalim!" Poster lainnya bernada sesalan bertuliskan, "Kadis PK bodoh mau diobok-obok oleh inspektorat, mana harga dirimu?" Semua poster dan spanduk tersebut ditempelkan demonstran di pagar Kantor Wali Kota Lhokseumawe, sehingga menjadi sumber perhatian warga yang berlalu lalang. Sementara itu, Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh, Sayuti Aulia menyatakan telah mendapat informasi bahwa ada hak guru yang diduga diselewengkan Pemko Lhokseumawe. "Karena itu dalam waktu dekat kami akan laporkan persoalan itu ke Kejaksaan Tinggi Aceh," imbuhnya.

Sayuti juga akan melaporkan tindakan Pemko Lhokseumawe ke DPR RI karena salah menafsirkan aturan dan akan menyurati Presiden RI terkait hal itu. Sampai pukul 16.30 WIB kemarin, tidak satu pun pejabat pemko yang menjumpai guru yang sedang berdemo di bawah pengawalan polisi. Lalu, mereka akhirnya membubarkan diri secara tertib.

Sementara itu, Kadisdikpora Lhokseumawe, Drs Rusli MM kepada Serambi menyatakan tidak melarang jika ada guru yang demo, karena itu hak mereka. Tapi soal TPK tidak diberikan kepada guru memang sudah menjadi kebijakan final Pemko Lhokseumawe. "Untuk tahun ini memang tidak ada lagi dana TPK bagi guru dan itu sudah final," tukasnya. Dalam tahun ini, demo kemarin merupakan yang kedua dilakukan Kobar-GB bersama guru-guru Lhokseumawe, namun tetap belum ada tanggapan menggembirakan dari pemko setempat. **(c37)**[19]

[19] Serambi Indonesia, 12 April 2012

Organisasi Guru Desak Pemko Lhokseumawe Bayar TPK

BANDA ACEH - Dua organisasi guru, yaitu PGRI dan Kobar GB, mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe agar segera membayar Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada guru bersertifikasi, sama seperti pegawai negeri sipil (PNS) lainnya.

"Wali Kota Suadi Yahya tidak boleh memberikan perlakuan berbeda antara PNS dengan guru. Kalau untuk PNS dan pejabat di lingkungan Pemko ada TPK, kenapa untuk guru tidak diberikan?" tanya ketua Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid.

Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan, Senin (18/3). Ia mengaku kecewa terhadap kebijakan Pemko Lhokseumawe tersebut. "Apalagi kebijakan itu dilakukan di saat-saat guru sedang bersiap untuk menuntaskan pembelajaran akhir bagi siswa kelas III yang akan mengikuti ujian nasional April 2013 mendatang," tambah Ramli Rasyid yang didampingi sejumlah pengurus PGRI Aceh lainnya.

Keluhan dan kekecewaan serupa juga disampaikan Ketua Kobar GB, Sayuthi Aulia. Menurut dia, apa yang dikemukakan kepala inspektorat Lhokseumawe bahwa pemberian TPK untuk guru akan bermasalah, sama sekali tidak benar.

"Yang benar, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), justru pemberian dana Rp 4 miliar untuk PSLS Lhokseumawe yang bermasalah," tegas Sayuthi.

Karena itu, ia meminta agar dana Rp 6 miliar untuk guru bersertifikasi yang sudah disetujui DPRK Lhokseumawe agar segera dicairkan. "Tidak ada alasan Pemko menahan hak-hak guru," tegasnya.

Alasan Pemko Lhokseumawe enggan mencairkan TPK guru karena penerimaan guru yang terlalu banyak dikatakan Sayuthi merupakan alasan yang tak masuk akal. "Padahal jika dibanding dengan tunjangan

yang diterima pejabat, apa yang diterima guru masih sangat sedikit," pungkas Sayuthi.

Menyakut adanya rencana mogok para guru di Lhokseumawe, Ketua PGRI Aceh Ramli Rasyid, mengatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya tidak berharap para guru melakukan aksi mogok. "Saya berharap rekan-rekan guru terus berkonsentrasi bertugas dalam menghadapi UN 2013. Mogok merupakan jalan terakhir, jika semua jalan sudah tidak bisa digunakan," katanya.

Karena itu, Ramli Rasyid dan Sayuthi Aulia mengharapkan Pemerintah Aceh untuk memberikan "partispasinya" bagi pencairan dana TPK guru bersertifikasi yang bertugas di Lhokseumawe. "Mungkin hanya pesan Gubernur atau Wagub yang bisa mengubah kebijakan Pemko Lhokseumawe tersebut," kata Sayuthi Aulia.**(sir)**[20]

Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam penelitian ini antara lain :

1. Aplikasi Pelaksanaan Teori Agenda Setting yang merupakan salah satu Teori Komunikasi Massa ditemukan pada Koran Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada. Bentuk dari Aplikasi teori ini adalah adanya koordinasi bahkan petunjuk yang diberikan oleh Manajemen Redaksi Koran Harian Serambi Indonesia dan Koran Harian Waspada kepada para Koordinator Liputan dan para wartawan untuk menelusuri dan menulis perkembangan tentang Informasi-informasi terbaru yang layak muat dan sedang hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan.
2. Dalam melaksanakan perannya Menyampaikan informasi kepada pembaca, ditemukan adanya berita-berita yang berhubungan dengan aplikasi Teori Agenda Setting pada koran Harian Serambi Indonesia dan Koran Waspada.

[20] Serambi Indonesia, 20 Maret 2013

3. Bagi Kalangan Wartawan dan Pengelola Media, hal-hal yang berkaitan dengan nilai berita untuk ditulis dan layak muat antara lain adalah kedekatan dengan narasumber, berita-berita sensasi, dan Isu-Isu Aceh yang berskala Nasional. Pemilihan nilai-nilai berita itu juga dapat meningkatkan Oplah dari Kedua Koran tersebut.

Saran Saran.

Setelah melihat hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang;

1. Bagi pengelola Media diharapkan agar Aplikasi Pelaksanaan Teori Agenda Setting ini perlu diperhatikan agar informasi yang akan disampaikan tersebut mendapat perhatian bagi para pembacanya sehingga akan meningkatkan oplah medianya.
2. Bagi para Pembaca media juga diharapkan agar dapat berhati hati dan memiliki pengetahuan tentang teori Agenda Setting sebuah Media Massa sehingga pembaca dapat menentukan Sikap dan Pemikirannya terhadap informasi yang berkembang dalam masyarakat dan dimuat oleh Media Massa.
3. Sesuai hasil penelitian ini, yang belum ditemukan adalah bagaimana Pengaruh Teori Agenda Setting kepada para Pembaca. Karenanya, diperlukan penelitian lain dengan merumuskan Indikator yang jelas untuk mengukur bagaimana pengaruh Teori Agenda Setting bagi pembaca. Hal ini penting agar pelaku media dapat memantau dan mengevaluasi pemilihan berita yang tepat untuk menjadi pilihan para pembaca.

Daftar Pustaka

Joseph Devito, ***Komunikasi Antar Manusia,*** Edisi 5 (alih bahasa Maulana A). New York: Harper Collin Publisher, 1996

Onong Uchjana Effendi, ***Dinamika Komunikasi.*** Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993

Amri Jahi, ***Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga.*** Jakarta: Gramedia, 1993

Rachmadi, F., ***Perbandingan Sistem Pers.*** Jakarta: Gramedia, 1989

Nuruddin. ***Pengantar Komunikasi Massa***. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Burhan Bungin. ***Sosiologi Komunikasi.*** Jakarta: Kencana Jakarta,2006

Bernard C. Cohen, ***The Press and Foreign Policy,*** dalam EM. Griffin, *A First Look,*

Everret M. Rogers dan James W. Dearing, **"Agenda Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Going?" dalam *Communication Yearbook** *11, ed. James A. Anderson, Sage, 1988.*

Lazarsfeld, ***People's Choice,*** **dalam *McQuail's Mass Communication Theory,***

Walter Lippmann, ***Public Opinion,*** *New York: MacMillan,1921.*

Pamela J. Shoemaker, ***Media Gatekeeping,*** 1996, dalam Littlejohn dan Foss, *Theories of Human Communication,*

Stefaan Welgrave dan Peter Van Aelst, ***The Contigency of the Mass Media's Political Agenda setting Power: Toward a Preliminary View,*** *Journal of Communication* 56, 2006,

Karen Siune dan Ole Borre, ***"Setting the Agenda for a Danish Election"****, Journal of Communication 25, 197,*

Everett M. Rogers dan James W. Dearing, **"Agenda Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Going?"** dalam *Communication Communication Yearbook 11, ed. James A. Anderson, Sage, 1988, .*

Albert Widjaya, ***Content Analysis,*** **tesis,** (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982).

Alan Bryman, ***Social Research Methods,*** (New York: Oxford University Press, 2001), hal. 46.

Faris Khoirul Anam, 2008. **Fiqih Jurnalistik**, pustaka Al Kausar Jakarta

Martin Moentadhiem, 2006S.M **Jurnalistik Tujuh Menit** Penerbit ANDI Yogyakarta

AS Haris Sumadiria;2006. **Bahasa Jurnalistik.** PT Sembiosa Rekatama Media

Suf Kasman, 2004 ***Jurnalisme Universal*** : PT Mizan Media Utama Bandung

Phil.Astrid S.Susanto ; **Komunikasi Dalam Teori dan Praktek,** Bandung ; Bina Cipta, 1974

Ali Yafie : ***Khazanah Informasi islam Jakarta,*** Pustaka Panji Mas : 1989

Askurifai Baksin,2006, **Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik;** Simbiosa Rekatama Media

Onong Uchayana Efendi, ***Dimensi-Dimensi Komunikasi*** ; Bandung :Alumni : 1996

Agusssalim, **Teori dan Paradigma Penelitian Sosial**, PT Tiara Wacana Jogyakarta 2001

Arikunto, Suharsimi. 2000.**Manajemen Penelitian** cet. V. Jakarta: PT Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2003. **Analisis data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, cet. II**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.

Bungin, Burhan (ED). 2007. **Metodologi Penelitian Kwaliltatif.** Jakarta **:** PT Rajagrafindo

Hasan, M.Iqbal. 2002. **Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.** Jakarta : PT Ghalia Indonesia Indonesia